BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berjalan cukup baik. Jika dilihat melalui kacamata teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keempat faktor penting komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah dijalankan secara serius dan terarah. Dalam aspek komunikasi, KPK mampu membangun jalur komunikasi yang efektif dan terbuka melalui berbagai rapat koordinasi dan sosialisasi langsung ke kampus-kampus, sehingga pesan tentang pentingnya integritas dan antikorupsi dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Meskipun menghadapi keterbatasan jumlah pegawai dan tantangan geografis yang luas, KPK tetap berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melibatkan penyuluh antikorupsi bersertifikat.

Komitmen para pelaksana di internal KPK pun sangat kuat, terlihat dari keseriusan mereka dalam menjalankan mandat pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan. Di sisi lain, struktur birokrasi yang terbangun antara KPK, kementerian, dan lembaga pendidikan memperlihatkan pembagian peran yang rapi dan kolaboratif, mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, upaya KPK dalam mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi telah menanamkan pondasi penting bagi lahirnya generasi bangsa yang lebih berintegritas, meskipun

tantangan di lapangan tetap harus dihadapi dengan strategi yang adaptif dan kolaborasi yang semakin diperkuat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk menjaga keberlanjutan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di perguruan tinggi. KPK berfokus pada dua pendekatan utama yaitu menanamkan nilai integritas dalam diri mahasiswa melalui insersi materi PAK ke dalam mata kuliah wajib, serta menciptakan ekosistem kampus yang berintegritas melalui program seperti Via PTN. Komisi Pemberantasan Korupsi menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dicapai sendiri, sehingga menggandeng berbagai pihak seperti Kemendikbudristek, kementerian lain, hingga komunitas Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) untuk memastikan program tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk memastikan PAK berjalan efektif dan berdampak nyata, KPK rutin memantau pelaksanaan melalui Survei Penilaian Integritas Pendidikan dan laporan di sistem Dapodik atau PDDikti. Melalui sinergi kebijakan, kolaborasi luas, dan pemantauan berbasis data, KPK menempatkan pendidikan sebagai pondasi penting dalam membangun budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan di perguruan tinggi.

Program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima dengan antusias dan dinilai sangat penting oleh berbagai kalangan, mulai dari dosen, pimpinan kampus, hingga mahasiswa. Mereka memandang PAK bukan sekadar mata kuliah tambahan, melainkan sebagai upaya besar untuk membangun karakter generasi muda yang

jujur dan berintegritas di tengah tantangan maraknya praktik korupsi. Pendidikan Anti Korupsi dinilai telah memberikan dampak nyata, di mana mahasiswa mulai memahami lebih dalam tentang arti korupsi, cara mencegahnya, serta pentingnya menjaga kejujuran sejak dini. Namun demikian, para *stakeholder* juga menyadari bahwa hasil sejati dari program ini tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Ukuran keberhasilannya baru akan terlihat ketika mahasiswa menghadapi dunia kerja, di mana nilai-nilai yang mereka pelajari benar-benar diuji. Untuk itu, mereka mendorong agar program ini terus diperkuat, baik dari sisi sosialisasi regulasi di kampus, pengawasan pelaksanaan, maupun pengembangan metode pembelajaran yang lebih aktif dan aplikatif. Meskipun monitoring sudah berjalan, evaluasi kualitas pembelajaran masih menjadi tantangan karena keragaman kebijakan di masing-masing perguruan tinggi. Dengan segala pencapaian dan tantangan tersebut, para *stakeholder* tetap optimistis bahwa dengan konsistensi dan komitmen bersama, program PAK akan menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Kajian Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan.
2. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang serupa sehingga dapat dikembangkan secara lebih luas dan mendalam melalui metode, teori, dan objek penelitian yang berbeda.
3. Bagi Universitas Islam 45 Bekasi semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan dosen agar bisa melakukan penelitian yang lebih baik kedepannya.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud memberikan rekomendasi bagi institusi atau lembaga pihak terkait, harapan kedepannya dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Anti Korupsi sebaiknya dijadikan bagian dari mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi. Ini tidak hanya membuat pendidikan anti korupsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, tetapi juga menanamkan nilai integritas secara mendalam. Hal ini dapat mencakup pengajaran tentang etika, tanggung jawab sosial, serta mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang akan sangat relevan untuk membentuk karakter mahasiswa di dunia profesional.

2. Untuk membuat pembelajaran PAK lebih efektif, metode pengajaran aktif perlu diperkenalkan secara lebih luas. Alih-alih hanya belajar teori, mahasiswa dapat terlibat langsung dalam proyek sosial atau simulasi yang mengharuskan mereka untuk mengaplikasikan nilai integritas. Pendekatan semacam ini bisa membantu mereka merasakan secara langsung bagaimana nilai-nilai tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata.
3. Untuk mengetahui seberapa efektif program ini, evaluasi yang lebih mendalam perlu dilakukan. Meskipun ada survei dan penilaian integritas, penting untuk mengevaluasi tidak hanya hasil akademik mahasiswa, tetapi juga perubahan perilaku dan penerapan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, KPK bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang ada dalam implementasi PAK.
4. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, terutama mengenai regulasi yang mendukung program ini, perlu diperluas. Semua pihak, dari dosen hingga mahasiswa, harus benar-benar memahami manfaat dan urgensi dari program ini.
5. Pendidikan Anti Korupsi harus diikuti dengan upaya untuk menciptakan ekosistem kampus yang mendukung nilai-nilai integritas. Ini bisa mencakup kebijakan yang transparan, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta pemberian ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan atau melaporkan potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan menciptakan lingkungan yang

sehat dan bersih dari praktik korupsi, nilai-nilai yang diajarkan dalam PAK dapat lebih mudah diimplementasikan.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya lebih gencar lagi melakukan sosialisasi tentang pentingnya PAK kepada semua kalangan di kampus, mulai dari dosen, pimpinan kampus, hingga mahasiswa. Ini bisa dilakukan melalui seminar, webinar, atau bahkan sesi pertemuan langsung yang lebih personal di kampus-kampus. Dengan begitu, semua pihak akan lebih paham tentang apa yang diharapkan dari program ini dan mengapa PAK sangat penting untuk diterapkan.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melibatkan lebih banyak Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) untuk mendukung pelaksanaan PAK di kampus-kampus. Selain itu, pelatihan bagi dosen agar lebih siap mengajar materi PAK juga sangat penting. Hal ini bisa meningkatkan kualitas pengajaran PAK di perguruan tinggi dan memastikan pengajaran yang lebih menarik serta bermanfaat bagi mahasiswa.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya melakukan evaluasi berkala dalam program pendidikan anti korupsi agar mengetahui ada atau tidak perubahan persepsi di masyarakat.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya juga melakukan analisa tingkat keberhasilan pendidikan.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya bekerjasama langsung dengan Perguruan Tinggi.